

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ATURAN DAN
SANKSI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA
(Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang
Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang)**

SKRIPSI

Oleh:

Khofidhotur Rovida

NIM. C93217088



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khofidhotur Rovida
NIM : C93217088
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP ATURAN DAN SANKSI HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG DI
INDONESIA DAN MALAYSIA (Studi Komparasi
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang dan Undang-Undang
Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007
Tentang Anti Perdagangan Orang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Januari 2021

Saya yang menyatakan



Khofidhotur Rovida

C93217088

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khofidhotur Rovida NIM. C93217088 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 4 Februari 2021

Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is slanted upwards from left to right.

Moh. Hatta, S.Ag., M.HI

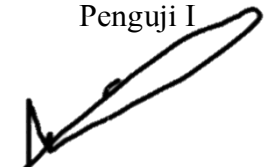
NIP. 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khofidhotur Rovida C93217088 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Senin, 22 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


M. Hatta, S.Ag, M.HI
NIP. 197110262007011012

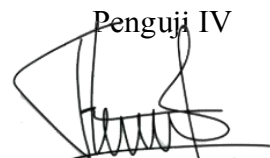
Penguji II


Dr. H. M. Hasan Ugaidillah., S.HI, MSi
NIP.197911052007011019

Penguji III


Dr. Holilur Rohman, S.H., MH
NIP. 198710022015031005

Penguji IV


Muh. Jazil Rifqi, S.Sy.,MH
NIP. 199111102019031017



Surabaya, 25 Februari 2020

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 1959040419880310



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawahini, saya:

Nama : Khofidhotur Rovida
NIM : C93217088
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : fidarovida123@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ATURAN DAN SANKSI HUKUM
DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG
DI INDONESIA DAN MALAYSIA (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang
Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih- media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Februari 2020

Khofidhotur Rovida

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP ATURAN DAN SANKSI HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA

A. Analisis Terhadap Aturan Dan Sanksi Hukum Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Di Indonesia Dan Malaysia

Aturan mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam suatu negara merupakan suatu aturan yang sangat vital adanya. Hampir seluruh negara memiliki aturan mengenai perdagangan orang tersebut, begitupun di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara tersebut memiliki aturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang tersebut yakni berupa Undang-Undang khusus guna mengatur tindak pidana perdagangan orang, yang mana disahkannya Undang-Undang tersebut sebagai salah satu upaya negara untuk menekan angka terjadinya perdagangan orang.

Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan transnasional, yang mana semua kegiatan didalamnya sudah terorganisir dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan dilapangan dapat dikategorikan sudah cukup mulus. Perdagangan orang sendiri ruang lingkungannya sudah lintas negara, dan juga merupakan salah satu dari *extraordinarycrime* atau salah satu kejahatan luar biasa yang dalam penanganannya juga harus luar biasa. Seperti pengertian yang telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bahwa perdagangan orang adalah suatu tindakan pengangkutan, perekrutan, pengiriman, penampungan, pemindahan atau penerimaan seseorang yang dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyekapan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat meskipun telah mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negeri maupun antar negara dengan tujuan eksploitasi.

Dalam aturan hukum mengenai perdaganganan oarng atau yang sudah terangkum dalam Undang-Undang baik saat ini berlaku di Indonesia maupun di

- Prasetya, T. *Aspek Hukum Perdagangan Orang*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Risnandri, Y. (n.d.). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Oelamasi Nusa Tenggara Timur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 4/Pid.Sus/2017/PN.Olm)*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2020
- Sahara, V. N. (n.d.). *Analisis Hukum Pidana islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Ratu Spa Medan (Studi Putusan Pengadilan Medan No. 319/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya. 2019
- Sahid. *Epistimologi Hukum Islam*. Surabaya: Pustaka Idea. 2015.
- SinlaEloE, P. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press. 2017.
- Smith, T. E. Islam Ana The Abilition Of Slavery. *Journal of African History*. 2007.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1984.
- Supriyadi. *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*. ELSAM, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. 2005
- Syamsudin, A. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Khusus*. Jakarta Sinar Grafika. 2014.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. (n.d.). *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 21 Tahun 2007. (n.d.). *Tentang Anti Perdagangan Orang Dan Anti Penyelundupan Migran*.
- Usman, E.-Q. *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung. 2018
- Wafi, ' '.-W. *Huquq al-Insan fi al-Islam*. Kaito: Dāar Nahdhah Mishr. 1979.
- Zaman, Q. Studi Gender Dan Anak. *Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking)*. 2017.